Volume 8 Issue 6 (2024) Pages 1887-1906
Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini
ISSN: 2549-8959 (Online) 2356-1327 (Print)

Hidden Curriculum Buku Pelajaran Sosiologi: Transfer Ideologi Antar Generasi

Anisatul Khanifah[1]✉, Moh Mudzakkir[2]
Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *hidden curriculum* dalam buku pelajaran Sosiologi SMA dari era Megawati hingga Jokowi, serta mekanisme transfer ideologi dari siswa kepada anak usia dini. Dengan menggunakan analisis konten dan teori Reproduksi Ideologi Althusser, penelitian ini menemukan bahwa buku pelajaran Sosiologi mengarahkan siswa untuk memandang ketidaksetaraan sosial sebagai masalah individual, bukan struktural, serta menanamkan nilai nasionalisme dan multikulturalisme. Transfer ideologi ini berlangsung melalui *learning continuum*, di mana siswa SMA mentransfer nilai-nilai tersebut kepada anak-anak usia dini melalui interaksi sosial, yang memperkuat penerimaan terhadap hierarki sosial yang ada. Buku teks, meski memberikan ruang terbatas untuk kritik terhadap pemerintah, berfungsi tidak hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan status quo sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi kurikulum untuk mendorong pemikiran kritis, mengintegrasikan perspektif kritis, serta pemberdayaan siswa dalam mengkritisi ketidakadilan struktural.

Kata Kunci: *hidden curriculum; buku pelajaran sosiologi; anak usia dini*.

Abstract
This study aims to analyze the hidden curriculum in high school Sociology textbooks from the Megawati to Jokowi eras and the mechanism of ideological transfer from students to young children. Using content analysis and Althusser's Ideological Reproduction theory, the study finds that the Sociology textbooks direct students to view social inequality as an individual issue rather than a structural one while instilling values of nationalism and multiculturalism. The transfer of ideology occurs through the learning continuum, where high school students pass these ideological values to younger children through social interaction, reinforcing the acceptance of existing social hierarchies. The textbooks function as knowledge sources and tools to maintain the existing socio-political and economic status quo. This study recommends curriculum evaluation to promote critical thinking, integrate critical perspectives, and empower students to analyze structural injustices critically.

Keywords: *hidden curriculum; sociology textbooks; early childhood.*

Copyright (c) 2024 Anisatul Khanifah & Moh Mudzakkir

✉ Corresponding author:
Email Address: anisatulkhanifah.21020mhs@unesa.ac.id (Surabaya, Indonesia)
Received 21 September 2024, Accepted 30 December 2024, Published 30 December 2024

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

Pendahuluan

Pendidikan tidak lagi sepenuhnya bebas nilai untuk menemukan momentumnya, melainkan kerap dijegal pada nilai tertentu. Ideologi dalam pendidikan sejatinya sudah terkonstruksi dalam etika sosial seperti yang dijelaskan oleh O'neill & Naomi, (2001:35) dalam (Syafii, 2018) bahwa ideologi dimaksudkan untuk mengarahkan perilaku atau tindakan sosial seseorang dan bukan hanya sekedar untuk pendidikan semata. Pernyataan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi sarana pembelajaran murni, tetapi juga menjadi media penyebaran ideologi yang membentuk cara pandang individu terhadap realitas sosial yang tanpa disadari politik dan ideologi telah menyusupi arena pendidikan tersebut. Louis Althusser (Althusser, 2007:147-222) lebih jauh menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bagian dari ***Ideological State Apparatus*** **(ISA)** yang dimanfaatkan kelas penguasa untuk melanggengkan ideologi dominan. Ideologi tersebut sering kali disampaikan secara implisit melalui mekanisme yang dikenal dengan **hidden curriculum**, yakni kurikulum tersembunyi yang tidak secara eksplisit diajarkan, tetapi terinternalisasi melalui interaksi siswa dengan sistem pendidikan, tenaga pengajar, dan buku pelajaran.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, kini telah mengalami obesitas oleh kepentingan tertentu melalui ideologi dan melalui dinamika perubahan kurikulum yang mencerminkan agenda politik dari setiap pemerintahan. Hal ini terlihat melalui kebijakan kurikulum 1975 yang memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), diikuti dengan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) pada 1985 sebagai upaya menanamkan nilai-nilai 45 pada generasi muda (Bunyamin, 2008:135) dalam (Mamduh & Hidayat, 2019). Bahkan setelah Orde Baru berakhir, dinamika pendidikan masih terbelenggu oleh ideologi dan politik yang semakin terkonstruksi, mengaburkan batas antara keduanya. Perubahan kurikulum tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pemerintahan. Mulai dari Kurikulum 2004, Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka, semua mencerminkan adaptasi terhadap visi ideologis pemerintah dan tantangan sosial-politik yang dihadapi masing-masing pemerintahan.

Perubahan kurikulum memantik pernyataan skeptis; "*Ganti menteri, ganti kurikulum*." Pernyataan tersebut dilegitimiasi oleh (Edi, 2018) bahwa pendidikan yang dikoordinasi oleh pemerintah dalam sebuah negara pasti didasari oleh visi ideologis tertentu. Kaitan antara ideologi dan kurikulum telah didiskusikan oleh Michael Apple (2004) dalam (Edi, 2018) mengungkap bahwa kurikulum tidak hanya menyampaikan pengetahuan formal, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai yang tidak selalu terlihat jelas sehingga *hidden curriculum* ini dapat mencerminkan ideologi dominan yang memengaruhi cara siswa memandang fenomena sosial, politik, dan ekonomi. Dalam buku pelajaran Sosiologi misalnya, materi yang diajarkan tidak hanya mencakup teori-teori sosial, tetapi juga nilai-nilai ideologis yang menyiratkan kepentingan politik tertentu. Menurut (Ebadi, 2013:62) menjelaskan bahwa hidden curriculum berpengaruh terhadap pengalaman belajar siswa dan dapat mengubah cara pandang mereka terhadap realitas sosial, sehingga kurikulum tersembunyi atau *hidden curriculum* ini mampu membawa pengaruh bagi perubahan nilai, cara pandang dan perilaku siswa (Gattron dalam Caswita, 2013:46) dalam (Maryani & Dewi, 2018). Dengan demikian, buku pelajaran Sosiologi berfungsi tidak hanya sebagai sumber pembelajaran teori sosial, tetapi juga sebagai alat reproduksi ideologi yang mendukung struktur sosial yang ada.

Dalam konteks pendidikan formal, buku pelajaran kerap menjadi alat strategis utama untuk mentransfer 'pengetahuan' dan nilai-nilai ideologis kepada siswa yang tidak hanya berperan penting dalam mengajarkan teori, tetapi juga menyiratkan ideologi dominan yang ada di masyarakat. Buku ini secara implisit memengaruhi cara siswa memandang realitas sosial, mengingat siswa, sebagai generasi muda dalam lingkungan pendidikan, berada dalam posisi rentan terhadap penyusupan pengetahuan dominan dari kelas tertentu. Menurut (Althusser, 2007), siswa tidak hanya terpapar ideologi melalui arena pendidikan, tetapi juga berpotensi menjadi agen ideologi dengan mereproduksi nilai-nilai yang telah terinternalisasi

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

kepada generasi yang lebih muda seperti anak usia dini, sehingga membentuk subjek ideologi yang mendukung struktur sosial yang ada.

Kajian atas tema *hidden curriculum* dan pendidikan sejatinya telah dilakukan oleh (Mamduh & Hidayat, 2019) berjudul "*Ideology Reproduction in Sociology Textbooks under the 2006 and 2013 Curriculum*" menunjukkan bahwa buku pelajaran Sosiologi SMA dalam kurikulum 2006 dan 2013 merupakan bagian dari *Ideological State Apparatus* yang secara sistematis menyampaikan ideologi dominan untuk melanggengkan status quo pemerintah. Namun, penelitian ini masih terbatas pada dua kurikulum tersebut dan belum membahas bagaimana perubahan ideologi terlihat dalam buku pelajaran Sosiologi dari masa pemerintahan Megawati hingga Jokowi, termasuk dampaknya terhadap pembentukan cara pandang siswa terhadap isu-isu sosial. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana siswa, sebagai subjek pendidikan, berperan dalam mereproduksi nilai-nilai ideologi kepada generasi di bawahnya, seperti anak usia dini, sehingga menciptakan mekanisme reproduksi ideologi yang berkelanjutan melalui ***learning continuum*** dan terdapat kesenjangan dalam penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada analisis kurikulum tertentu tanpa memperhatikan transformasi ideologi yang terjadi sepanjang berbagai periode pemerintahan. Selain itu, mekanisme bagaimana siswa, sebagai subjek pendidikan, mereproduksi nilai-nilai tersebut kepada generasi yang lebih muda, seperti anak usia dini belum banyak dikaji.

Dengan demikian, berdasarkan riset yang penulis lakukan, tidak banyak penelitian yang mengeksplorasi perubahan ideologi dalam buku pelajaran Sosiologi dalam konteks *hidden curriculum* khususnya dalam periode pemerintahan Presiden Megawati hingga Jokowi, terlebih mengaitkannya bagaimana siswa mereproduksi paparan ideologi tersebut kepada generasi di bawahnya seperti anak usia dini. Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis hidden curriculum dalam buku pelajaran Sosiologi SMA sebagai media reproduksi dominan dari era Megawati hingga Jokowi 2) Menganalisis mekanisme transfer nilai ideologi terjadi dari siswa kepada anak usia dini dalam menciptakan reproduksi ideologi yang berkelanjutan.

Dengan menggunakan kerangka teori *Ideological State Apparatus* (ISA) Louis Althusser, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana pendidikan, melalui buku pelajaran, menjadi alat negara dalam melanggengkan ideologi dominan, serta bagaimana siswa berperan sebagai agen dalam meneruskan nilai-nilai tersebut kepada generasi yang lebih muda melalui interaksi sosial sehari-hari.

Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode analisis konten *(content analysis)* dengan teori Reproduksi Ideologi dari Louis Althusser sebagai landasan analisis. Teori ini relevan untuk menjawab rumusan masalah terkait bagaimana ideologi setiap pemerintahan memengaruhi isi buku pelajaran Sosiologi, yang menyampaikan *hidden curriculum* secara eksplisit maupun implisit. Analisis konten digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam muatan *hidden curriculum* dalam buku pelajaran Sosiologi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

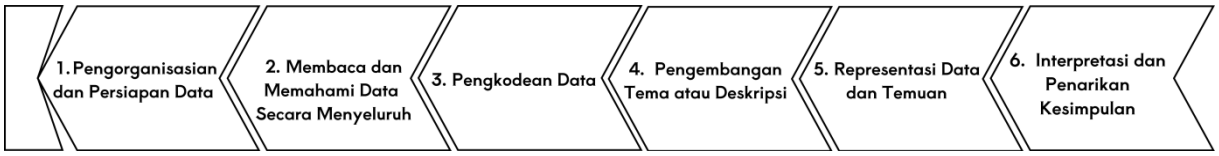
Sebagaimana diuraikan oleh Via Zuchdi (1993:1) dalam (Azizah, 2014) analisis konten berfungsi untuk menganalisis makna, pesan, dan cara pengungkapan pesan dalam teks. Menurut Budd dan Thorpe (Alwiyah, 2022, analisis konten memungkinkan penguraian sistematis dan mendalam terhadap pesan tersembunyi dalam teks, melalui analisa terhadap makna teks dan cara mengungkapkan teks tersebut, sehingga metode analisis konten dipilih karena relevansinya dengan konsep *hidden curriculum* yang dijelaskan oleh Althusser. Dalam pandangannya, ideologi bekerja tidak hanya melalui apa yang tampak secara eksplisit, tetapi juga melalui apa yang tersembunyi atau *latent*. Buku pelajaran, sebagai bagian dari *Ideological State Apparatus* (ISA), sering kali menjadi medium penyampaian ideologi dominan secara implisit melalui teks dan struktur narasi. Dengan analisis konten, peneliti dapat mengidentifikasi pesan-pesan eksplisit sekaligus menggali makna tersirat yang terstruktur

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

dalam teks. Hal ini memungkinkan pengungkapan bagaimana kurikulum tersembunyi mereproduksi ideologi tertentu dalam sistem pendidikan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur untuk meneliti data primer berupa buku pelajaran Sosiologi SMA. Pemilihan sumber melalui buku pelajaran Sosiologi dari berbagai kurikulum dan penerbit, didasarkan pada relevansinya dalam mengungkap *hidden curriculum* dan reproduksi ideologi dalam sistem pendidikan. Buku-buku dari Kurikulum 2004 hingga Kurikulum Merdeka dipilih untuk menganalisis perubahan ideologi di berbagai era pemerintahan, sesuai dengan teori Reproduksi Ideologi Althusser yang menyoroti peran buku pelajaran sebagai bagian dari *Ideological State Apparatus* (ISA). Kombinasi buku cetak dan BSE memperluas cakupan analisis, sementara artikel dan dokumen mendukung validitas data, yang menghasilkan penelitian yang komprehensif, sistematis, dan representatif. Selain itu, terbitan yang variatif, seperti Bumi Aksara (Waridah et al., 2003, 2005) untuk Kurikulum 2004, BSE dari Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan untuk Kurikulum 2006 (Elisanti & Rostini, 2009; Laning, 2009a, 2009b), terbitan Esis untuk Kurikulum 2013 dan Revisi K-13 (Maryati & Suryawati, 2013, 2014, 2015), serta terbitan Esis dan Erlangga untuk Kurikulum Merdeka (Maryati et al., 2022; Purwasih & Pratiwi, 2021, 2022) memberi dimensi yang lebih luas dan mendalam dalam menganalisis perubahan ideologi pendidikan dari waktu ke waktu.

Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan model spiral yang dikembangkan oleh Creswell, sebagaimana dijelaskan dalam (Sugiyono, 2019:344-347). Model spiral ini sangat relevan untuk penelitian dengan analisis konten, karena memberikan struktur yang aplikatif dalam menangani kompleksitas kajian reproduksi ideologi. Model ini memungkinkan analisis data dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengorganisasian data hingga interpretasi yang mendalam. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang kredibel dan bermakna.



Gambar 1. Konsep Analisis Data Model Spiral oleh Creswell (2015)

Hasil dan Pembahasan

Kurikulum 2004: Wajah Baru Pendidikan Indonesia Berbasis Kompetensi

Warisan pasca-Orde Baru tidak selamanya diadopsi menjadi kepemilikan oleh pemerintah di era reformasi khususnya dalam bidang Pendidikan. Indonesia mengalami perubahan besar dalam kebijakan pendidikan, salah satunya ditandai dengan lahirnya Kurikulum 2004 atau yang lebih dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum ini dirancang untuk menggantikan Kurikulum 1994 yang dinilai terlalu sentralistik dan sarat dengan kepentingan politik. KBK menjadi simbol reformasi pendidikan dengan menitikberatkan pada desentralisasi, inovasi pembelajaran, dan penguatan kompetensi individu siswa (Depdiknas, 2002). Menurut (Muis, 2018), kurikulum di masa Orde Baru memandang peserta didik sebagai "kertas putih" yang harus diisi dengan pengetahuan tanpa mempertimbangkan keunikan masing-masing individu. Sebaliknya, KBK memberikan perspektif baru dengan mengakui potensi setiap siswa yang beragam. Pendekatan ini berfokus pada poin-poin berikut; 1) Pengembangan kompetensi individu siswa, 2) Diversifikasi strategi pembelajaran dan evaluasi, 3) Kontekstualisasi pembelajaran berdasarkan kehidupan nyata, dan 4) Desentralisasi kurikulum ke tingkat daerah dan sekolah.

Desentralisasi ini didukung oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta PP No. 25 Tahun 2000, yang memberikan wewenang bagi daerah untuk mengelola pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Dengan demikian, Kurikulum 2004

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

menjadi pijakan bagi pendidikan yang lebih inklusif dan relevan, menjauh dari pendekatan sentralistik yang dominan di masa lalu (Suwarno, 2012).

Reformasi pendidikan ini juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial, seperti krisis moneter tahun 1998 dan Pemilu 2004 yang membuka ruang demokrasi lebih luas. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap *Millennium Declaration* tahun 2000 menegaskan pentingnya pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan (United Nations, 2000). Dalam hal pembangunan manusia, berdasarkan tinjaun data dari Human Development Index (HDI) Indonesia menunjukkan peningkatan dari 0,526 pada tahun 1990 menjadi 0,667 pada tahun 2000, meskipun masih berada di bawah rata-rata dunia (Hakim, 2024). Selain itu, dalam hal pendidikan dan sebagai respons terhadap tuntutan zaman, KBK menghadirkan pendidikan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan global. Melalui pendekatan psikologi behavioristik yang diintegrasikan dalam kurikulum ini menekankan pentingnya lingkungan dan konteks lokal dalam mengembangkan potensi siswa (Suwarno, 2012).

Kurikulum 2006: 'Pintu Demokrasi' dibuka dalam rangka Desentralisasi Pendidikan

Kurikulum 2006, atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), lahir sebagai respons terhadap kebutuhan desentralisasi pendidikan yang lebih nyata di era tersebut. Berbeda dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 yang masih menyisakan belenggu sentralistik dalam implementasinya, KTSP hadir untuk memperkuat otonomi daerah dan sekolah dalam merancang kurikulum sesuai kebutuhan dan potensi lokal (Uce, 2016). KTSP dirancang berbasis *Standar Kompetensi Lulusan (SKL)* dan *Standar Isi (SI)*, yang bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang relevan, fleksibel, dan terintegrasi. Proses ini mencerminkan semangat reformasi, di mana pendidikan tidak hanya menjadi alat transfer pengetahuan, tetapi juga pusat keunggulan *(centre of excellence)* yang mendorong kreativitas dan relevansi dalam pembelajaran (Rasidi, 2019)

Semangat desentralisasi dalam KTSP sejalan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mendorong pemerataan pembangunan berbasis daerah. Pada masa itu, ketimpangan akses pendidikan, terutama di pedesaan, menjadi tantangan besar. Data tahun 2005 menunjukkan hanya 25,3% anak usia 0-6 tahun yang mendapat layanan PAUD, sebagian besar berasal dari keluarga mampu di perkotaan. Ketimpangan ini menjadi fokus utama KTSP, yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan pendidikan inklusif dan berbasis kebutuhan lokal, sesuai dengan karakteristik sumber daya manusia dan fenomena tiap daerah, berbeda dengan era Orde Baru yang kerap 'dipaksa' untuk seragam. (Suryana, 2020).

Momentum 2006 menjadi tonggak penting dalam implementasi KTSP dalam sejarah pendidikan Indonesia. Melalui Permen No. 24 Tahun 2006, kurikulum ini resmi diterapkan, menggantikan uji coba KBK yang dihentikan sebelumnya, yang penyusunannya diserahkan kepada satuan pendidikan (daerah). Hal ini menegaskan bahwa KTSP tidak hanya bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga mendukung otonomi sekolah sebagai bagian dari upaya merawat semangat demokrasi melalui pendidikan (Alhamduddin, 2016).

Kurikulum 2013 dan K-13 Revisi: Pendidikan berkarakter sebagai manifestasi orientasi baru

Kurikulum 2013 (K-13) dirancang sebagai respons atas berbagai tantangan era digital dan globalisasi yang semakin kompleks. Di bawah kepemimpinan Muhammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kurikulum ini hadir untuk 'menyempurnakan' KTSP 2006 yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pendidikan saat itu, walaupun KTSP hadir dengan 'kemegahannya'. Fokus utama K-13 adalah mengembangkan kompetensi siswa yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sekaligus memperkuat pembentukan karakter (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). Pendekatan pembelajaran berbasis observasi, kolaborasi, dan aktivitas menjadi inti kurikulum ini, dengan

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

tahapan seperti mengamati, menanya, menalar, mencoba, hingga mencipta. Kurikulum ini mewujud manisfestasi untuk mencetak generasi yang kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan zaman (Mulyasa,2015:65) dalam (Mamduh & Hidayat, 2019).

Meski begitu, implementasi awal K-13 tidak lepas dari tantangan seperti kurikulum sebelumnya. Beban administrasi yang berat bagi guru, materi pelajaran yang dinilai terlalu banyak, dan penilaian yang kompleks menjadi beberapa kendala utama (Prasya, 2024). Untuk menjawabnya, K-13 direvisi tanpa mengganti nama utamanya, namun menyempurnakan agar lebih relevan dan praktis. Konteks kelahiran K-13 tak bisa dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi Indonesia kala itu. Bonus demografi yang diprediksi memuncak pada 2030 membawa peluang besar, tetapi juga risiko jika tidak dimanfaatkan dengan baik, seperti meningkatnya angka pengangguran yang besar. Selain itu, isu globalisasi pada tahun ini sedang gencar-gencarnya, terlihat dari hadirnya kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah berlaku sejak 2015 sebegai kesepakatan untuk mewujudkan integrasi ekonomi dan menghapuskan tantangan global di bidang ekonomi yang secara bersamaan menuntut sumber daya manusia Indonesia untuk lebih kompetitif di tingkat internasional (Sekretariat Kabinet RI, 2014).

K-13, terutama dalam versi revisinya, dirancang untuk menjawab kebutuhan ini dengan membekali siswa keterampilan abad ke-21, karakter yang kuat, serta literasi yang memadai. Dengan visi besar menciptakan "*Membangun generasi Emas 2045 dengan dibekali karakter, keterampilan abad 21 dan literasi,"* kurikulum ini menjadi landasan penting dalam membangun masa depan bangsa yang lebih cerah (Harosid, 2019). Ini memperlihatkan Energi positif dalam menyambut bonus demografi dan globalisasi tercermin dari bagaimana wacana dalam kurikulum 2013 dan edisi revisi mengedepankan pendidikan karakter.

Kurikulum Kampus Merdeka (2002): Manifestasi baru pendidikan Indonesia

Pemberlakuan Kurikulum Merdeka pada ajaran tahun 2022/2023, disebabkan karena kurikulum 2013 dan K-13 Revisi pada prakteknya mengalami benturan akibat muatan kurikulum tersebut dinilai terlalu ambisius yang berorientasi pada standar yang tinggi dengan tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk benar-benar memahami materi yang diajarkan (Pritchett & Beatty, 2012). Tingginya proporsi siswa di Indonesia dan negara berkembang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan minimum, menunjukkan bahwa masalah kurikulum ini berdampak pada sebagian besar siswa, bukan hanya segelintir siswa saja.

Selain menumbuhkan kreativitas, cita rasa, dan karsa siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, Kurikulum Merdeka untuk mewujudkan pembelajaran bermakna dan efektif yang meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia. Meskipun terdapat banyak prinsip desain kurikulum, namun ada tiga (tiga) prinsip yang telah dikembangkan agar lebih mudah dipahami dalam konteks Kurikulum Mandiri, yaitu; (1) menjamin dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter, (2) fleksibilitas, dan (3) berfokus pada konten penting (Wahyudin et al., 2024). Kurikulum ini juga menekankan pada pembelajaran kokurikuler melalui proyek dan intrakurikuler berbasis mata pelajaran yang lebih relevan, mendalam, dan lebih mandiri dibandingkan sebelumnya (Azmi, 2023).

Perubahan kurikulum sangat berhubungan dengan peristiwa yang ada pada saat itu seperti pandemi Covid-19 yang menggemparkan dunia termasuk Indonesia. Pandemi ini, menciptakan perubahan pada banyak hal, Covid-19 berkontribusi besar terhadap dampak buruk yang ditimbulkannya. Menurut Lembaga Kajian dan Advokasi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan pendidikan adalah sektor yang paling berdampak atas dampak negatif dari Covid-19 (Khanifah & Pribadi, 2022). Maka dari itu, Kurikulum Merdeka dihadirkan dengan tujuan pemulihan pembelajaran dari efek PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) yang menciptakan kesenjangan pembelajaran (*learning gap)* dan penguatan karakter melalui profil Pelajar Pancasila namun tetap mengadopsi karakteristik kurikulum-kurikulum

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

sebelumnya utmanya mengenai pendidikan karakter, melalui Kurikulum Merdeka pendidikan karakter diejawantahkan dalam profil Pelajar Pancasila (Azmi, 2023).

Tabel 1. Tabel Perbandingan Kurikulum 2004 – Kurikulum Merdeka

Aspek	Kurikulum 2004 (KBK)	Kurikulum 2006 (KTSP)	Kurikulum 2013 (K-13)	Kurikulum Merdeka (2022)
Latar Belakang	Reformasi pendidikan pasca-Orde Baru, fokus pada pengembangan kompetensi individu	Fokus pada desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah, serta penekanan pada pendidikan yang berbasis pada karakter dan potensi lokal	Respons terhadap tuntutan global dan nasional, dengan fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi abad ke-21	Respons terhadap beban berlebih di K-13 dan kebutuhan akan fleksibilitas, serta pengembangan kompetensi dan karakter siswa
Konteks Ekonomi	Paska Krisis Moneter		Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	Paska pandemi Covid-19
Konteks Global\ Nasional	Pembangunan Millenium dan Demokrasi		Globalisasi dan Teknosains & Bonus Demografi	Wacana Indonesia Emas 2045
Konteks Politik	Pembangunan Daerah		Politik Identitas	Pembangunan SDGs
Tujuan	Meningkatkan kompetensi individu, desentralisasi pendidikan, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal.	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyesuaian dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa.	Membentuk siswa dengan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat beradaptasi dengan perkembangan global.	Membantu siswa belajar dengan lebih fleksibel, mengurangi beban kurikulum, dan menekankan pada kompetensi serta pengembangan karakter.
Esensi	Pendidikan berbasis kompetensi, pembelajaran lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan daerah.	Sekolah diberikan kebebasan untuk merancang kurikulum berdasarkan kebutuhan lokal dan karakter siswa.	Pendekatan berbasis kompetensi, mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta mengutamakan pengembangan karakter.	Fleksibilitas dalam pembelajaran, penurunan beban kurikulum, serta penekanan pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa tanpa membebani.
Poin Pembeda	Fokus pada kompetensi individu, pembelajaran lebih terdesentralisasi.	Penekanan pada otonomi sekolah untuk merancang kurikulum sesuai kebutuhan lokal.	Integrasi kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dengan pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan karakter.	Fleksibilitas tinggi, lebih ringan dari sisi beban kurikulum, dan lebih berfokus pada perkembangan kompetensi dan karakter.
Tantangan & Masalah	Implementasi yang tidak merata karena kurangnya kesiapan daerah dan guru.	Tantangan dalam penerapan standar pendidikan yang tidak konsisten antar daerah.	Kesulitan dalam implementasi karena kurikulum yang kompleks dan padat.	Pembelajaran berbasis fleksibilitas memerlukan penyesuaian yang cukup besar di tingkat sekolah dan guru.

Sumber: Interpretasi dan observasi penulis

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

Melanggengkan Status Quo: Ideologi Utama Buku Pelajaran Sosiologi

Buku teks, sebagai salah satu materi utama dalam sistem pendidikan, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk mereproduksi ideologi yang dominan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi berperan penting dalam membentuk pandangan dan sikap siswa terhadap struktur sosial, politik, dan budaya yang ada. Melalui pemilihan materi, bahasa, dan cara penyajian informasi, buku teks dapat menguatkan atau bahkan memperkuat norma-norma tertentu yang mendukung status quo, serta membentuk kesadaran ideologis siswa tanpa disadari. Tabel 2 adalah muatan *hidden curriculum* yang ada dalam buku pelajaran sosiologi dari Kurikulum 2004 – Kurikulum Merdeka;

Tabel 2. Tabel Perbandingan Muatan Antar-Kurikulum

Aspek Utama	Sub-Aspek	Kurikulum 2004	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013 & K-13 Revisi	Kurikulum Merdeka
Struktur Isi Buku	Tema Utama	Menyoroti tantangan globalisasi, industrialisasi, dan modernisasi sebagai isu utama.	Fokus pada masalah sosial seperti korupsi dan program pemerintah, dengan ruang kritik yang cukup luas.	Stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi ditekankan melalui nilai nasionalisme.	Mengangkat isu kontekstual seperti pandemi, penyebaran hoaks, kekerasan seksual, dan kearifan lokal.
	Porsi Pembahasan	Kritik terhadap globalisasi dan modernisasi sebagai pemicu kriminalitas, penyimpangan, dan ketimpangan. Pemerintah disorot dalam konteks positif dalam perbaikan sistem, namun berhati-hati dalam membahas reformasi 1998.	Kritik terhadap pemerintah lebih eksplisit. Namun, terdapat bias yang cenderung menyalahkan masyarakat bawah. Isu toleransi dan Pancasila mendapatkan porsi besar.	Globalisasi dipandang sebagai peluang tetapi tetap dikritisi. Namun, kritik sosial terhadap ketimpangan minim dan lebih fokus pada pembangunan nasional.	Lebih banyak isu terkini yang dibahas. Solusi yang diangkat berbasis konteks lokal, namun kritik struktural tetap terbatas.
Pilihan Bahasa & Narasi	Pemilihan Kata	Pemilihan kata lebih kontekstual tetapi ambigu. Kritik terhadap pemerintah tetap hadir.	Bahasa lebih eksplisit dan lugas. Kritik terhadap ketimpangan sosial sangat terlihat.	Bahasa lebih formal dan normatif. Kritik terhadap pemerintah disampaikan dengan lebih halus.	Kata-kata lebih netral dan kontekstual, namun ruang kritik terhadap ketimpangan semakin berkurang.
	Nada & Sikap Narasi	Modernisasi dan globalisasi dipandang negatif. Ada kekerasan simbolik terhadap petani dan buruh.	Nada kritik penuh stereotip, terutama pada isu kelas bawah dan gender. Visual masyarakat kumuh sering	Globalisasi dianggap sebagai peluang besar. Nilai nasionalisme dan karakter bangsa ditekankan	Globalisasi dilegitimasi sebagai bagian dari perkembangan zaman. Narasi lebih netral dengan ruang

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

Aspek Utama	Sub-Aspek	Kurikulum 2004	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013 & K-13 Revisi	Kurikulum Merdeka
		Sentimen antikomunisme cukup dominan.	kali dihubungkan dengan nilai sosial yang rendah, tanpa menyentuh aspek struktural.	melalui fitur buku seperti "Sikap Spiritual", "Karakter Bangsa" dan "Sikap Sosial".	kritik yang semakin berkurang.
Representasi Tema Sosial	Kapitalisme & Ekonomi	Kapitalisme digambarkan sebagai dominasi Barat (AS, Eropa, Jepang) yang membawa kemajuan dan kekayaan. Namun keberadaanya dikiritik.	Kapitalisme digambarkan negatif, dengan narasi "penjajahan". Namun, Marxisme disebut sebagai ideologi diktator.	Kapitalisme dibahas dalam konteks globalisasi, tetapi tanpa kritik tajam. Narasinya lebih menerima.	Kapitalisme dikritik dengan halus, fokus diarahkan pada solusi berbasis ekonomi lokal sebagai alternatif.
	Representasi Kelas Sosial	Isu kelas sosial muncul, tetapi dengan kekerasan simbolik: petani dan buruh digambarkan sebagai representasi kelas bawah. Demo buruh dikaitkan dengan keserakahan, bukan kondisi struktural.	Terdapat bias terhadap pekerjaan manual seperti PRT dan tukang kebun. Isu ketimpangan sosial sering kali disederhanakan.	Isu ketimpangan sosial hadir, namun tanpa kritik tajam terhadap penyebab strukturalnya.	Ketimpangan sosial dibahas ringan. Masalah sosial sering dialihkan sebagai kesalahan individu atau komunitas, bukan institusi besar.
	Globalisasi	Globalisasi dikritik tajam sebagai penyebab masalah sosial dan ancaman bagi bangsa.	Globalisasi dipandang negatif tetapi diimbangi dengan solusi berupa penguatan nasionalisme dan Pancasila.	Globalisasi dipuji sebagai peluang tetapi tetap dilihat sebagai ancaman ideologi. Tidak ada kritik tajam.	Globalisasi sepenuhnya dilegitimasi sebagai peluang ekonomi dan mobilitas. Kritik terhadap dampaknya minim.
	Kesetaraan Gender	Kesetaraan gender hadir dalam konteks positif, dengan perempuan dianggap memiliki kesempatan yang setara.	Ada upaya mendukung kesetaraan gender, namun stereotip muncul dalam visualisasi PRT sebagai representasi kelas bawah.	Mengusung nilai egalitarianisme: kesetaraan gender dipandang perlu mencakup perubahan struktural, bukan hanya aspek formal.	Kesetaraan gender dibahas lebih mendalam dengan banyak studi kasus dan konteks yang relevan.

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

Aspek Utama	Sub-Aspek	Kurikulum 2004	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013 & K-13 Revisi	Kurikulum Merdeka
	Nasionalisme & Multikulturalisme	Menekankan toleransi beragama dan kebebasan beribadah sebagai bagian dari nilai multikultural.	Nasionalisme menjadi solusi isu sosial. Nilai Pancasila dan toleransi sangat ditekankan.	Nasionalisme dipertegas sebagai identitas bangsa melalui fitur "Karakter Bangsa". Reformasi 1998 disebut dengan bahasa normatif.	Nasionalisme dikedepankan sebagai solusi utama terhadap permasalahan global. Isu toleransi multikultural juga sangat ditekankan.
Tokoh & Teori	Tokoh yang Diangkat	Durkheim lebih dominan dibanding Comte. Karl Marx disebut dalam konteks negatif sebagai bagian dari komunisme.	Tokoh lokal seperti Soerjono Soekanto dan Selo Soemardjan hadir, dan Karl Marx pertama kali muncul secara visual.	Durkheim dan Soerjono Soekanto menjadi tokoh utama yang dibahas.	Karl Marx mulai dibahas netral, tidak lagi dianggap tabu. Kritik kapitalisme hadir dengan sikap netral.
	Teori Sosial	Teori fungsionalisme sangat dominan.	Teori fungsionalisme, konflik, dan sosialisasi mulai diperkenalkan.	Teori fungsionalisme tetap dominan, tetapi materi lebih kaya dengan teori sosial lain.	Teori kritis, konflik, dan tindakan sosial lebih banyak dibahas secara netral.
Ilustrasi & Visualisasi	Representasi Sosial	Visualisasi minim kekerasan simbolik; masyarakat digambarkan harmonis.	Visual masyarakat kumuh dijadikan simbol penyimpangan sosial, sementara aparat jarang dikritik.	Representasi visual lebih fokus pada peluang globalisasi. Kritik terhadap struktur sosial minim.	Visual lebih inklusif: isu lokal dan global digambarkan secara lebih konseptual dan beragam.

Sumber: Interpretasi dan observasi penulis pada buku pelajaran sosiologi

Muatan Eksplisit Ideologi/Hidden Curriculum pada Buku Pelajaran sosiologi

Sebagai bagian dari *ideological state apparatus* (ISA), buku pelajaran Sosiologi tidak hanya menyampaikan materi ajar, tetapi juga memuat nilai-nilai dan ideologi tertentu yang mencerminkan kepentingan dominan. Muatan ini, yang dikenal sebagai *hidden curriculum*, sering kali muncul secara eksplisit/implisit dalam pilihan bahasa, tema, dan ilustrasi yang disajikan kepada peserta didik. Sub bab ini akan menguraikan muatan ideologi atau *hidden curriculum* yang terkandung dalam buku pelajaran Sosiologi dari berbagai kurikulum, mulai dari Kurikulum 2004 hingga Kurikulum Merdeka melalui gambar yang diperoleh dari buku pelajaran Sosiologi. Untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, disajikan potongan teks asli yang secara jelas merepresentasikan ideologi atau *hidden curriculum* tersebut. Meskipun tidak seluruh konten dapat ditampilkan, contoh-contoh ini diharapkan mampu memperkuat argumentasi mengenai proses internalisasi ideologi dominan dalam materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Apa yang ada dalam sub bab ini belum mewakili muatan ideologi-ideologi maupun *hidden curriculum* yang ada dalam buku pelajaran sosiologi secara keseluruhan.

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

a. Kurikulum 2004

1. Paham Komunisme dinarasikan dengan sentimen, berhubungan dengan trauma masa lalu

> Pengamalan agama terancam karena masuknya paham liberalisme dan komunisme merugikan jiwa religius bangsa Indonesia.

Gambar 5. Muatan Ideologi/Hidden Curriculum
Sumber: (Waridah et al., 2005:42) | buku kelas 12

Narasi negatif tentang komunisme dalam buku pelajaran tanpa memberikan analisis kritis mencerminkan upaya pelanggengan trauma politik yang tidak membuka ruang diskusi untuk memahami ideologi ini secara historis dan objektif kepada siswa.

2. Muatan sikap kehati-hatian dalam membahas sisi 'lain' Orba
3.

> Tahun 1998 merupakan tahun kelabu bagi bangsa Indonesia. Betapa tidak? Masyarakat Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai masyarakat yang ramah tamah, berubah 180 derajat menjadi masyarakat yang (sebagian) beringas. Mereka menjarah, membakar, dan mengamuk bagaikan tidak mengenal peradaban sebelumnya. Mengapa semua ini

Gambar 6. Muatan Ideologi/Hidden Curriculum
Sumber: (Waridah et al., 2003:140) | buku kelas 11

Narasi tersebut, menekankan bahwa masyarakat Indonesia pada saat Orde bersifat ramah tamah seolah-seolah masyarakatnya harmonis dan tidak terjadi apa-apa. Fakta lapangan yang ada, masyarakat pada saat Orde Baru banyak yang 'gusar' karena situasi sosial dan politik yang banyak menciptakan ketimpangan. Kemudian narasi *'menjarah, membakar dan mengamuk bagaikan tidak mengenal peradaban'* sebuah narasi yang timpang, pasalnya alih-alih membahas sumbernya namun memilih fokus pada tindakan anarkisme warga semata.

b. Kurikulum 2006

1. Diskriminasi masyarakat kelas bawah

> Sebagai contohnya, masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh, masalah etika dan estetika kurang diperhatikan, sehingga berkata-kata kotor, membuang sampah sembarangan adalah hal biasa yang merupakan nilai sosial budaya. Namun, bagi masyarakat umum, dianggap sebagai perilaku yang melanggar kaidah-kaidah yang ada.

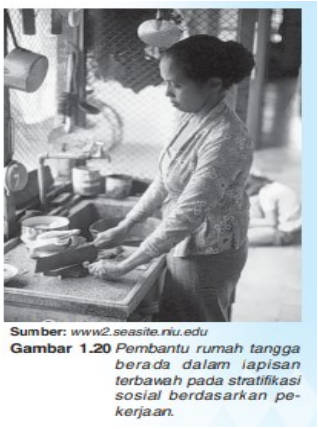
Gambar 7. Muatan Ideologi/Hidden Curriculum
Sumber: (Laning, 2009:102) | buku kelas 10


Sumber: Kompas, 10 Maret 2006
Gambar 5.6 Sosialisasi subkebudayaan menyimpang sering kali terjadi di lingkungan kumuh.

Gambar 8. Muatan Ideologi/Hidden Curriculum
Sumber: (Laning, 2009:102) | buku kelas 10

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

2. Diskriminasi profesi dan kekerasan simbolik terhadap perempuan



Sumber: www2.seasite.niu.edu
Gambar 1.20 *Pembantu rumah tangga berada dalam lapisan terbawah pada stratifikasi sosial berdasarkan pekerjaan.*

Gambar 9. Muatan Ideologi/Hidden Curriculum
Sumber: (Laning, 2009a:18) | buku kelas 11

Tenaga tidak terdidik, misalnya pembantu rumah tangga dan tukang kebun.

Gambar 10. Muatan Ideologi/Hidden Curriculum
Sumber: (Laning, 2009a:18) | buku kelas 11

Kekerasan simbolik dari pemilihan kalimat dalam membahas topik gender, buruh, dan masyarakat bawah dengan dengan eksplisit. Salah satunya adalah narasi masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh digambarkan memiliki masalah etika dan estetika kurang diperhatikan, sehingga berkata-kata kotor, membuang sampah sembarangan dinilai sebagai nilai sosial dari budayanya, memperkuat stereotip bahwa masyarakat kumuh memiliki nilai sosial rendah, tanpa mempertimbangkan faktor struktural yang memengaruhi perilaku mereka. Muatan diskriminasi lainnya yaitu menjadikan profesi 'Pembantu Rumah Tangga dan Tukang Kebun' sebagai contoh dari tenaga kerja tidak terdidik. Pemilihan contoh ini dapat mencerminkan bias kelas sosial yang menganggap pekerjaan manual "rendah" tanpa mempertimbangkan perspektif yang lebih inklusif dan menghormati keberagaman pekerjaan dalam masyarakat.

c. Kurikulum 2013

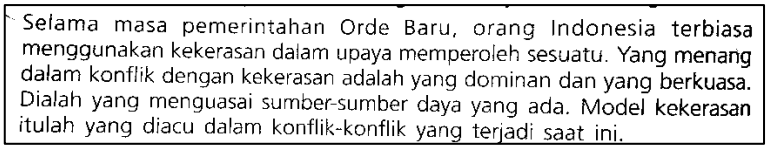
1. Muatan eksplisit egaliterianisme radikal

Kerap sekali orang mengalami kesulitan untuk menetapkan definisi yang sama tentang kesetaraan. Kesetaraan kerap dimaknai sebagai penghapusan pengecualian dalam hukum formal berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras dan gender. Konsep kesetaraan seperti ini tidak lagi cukup dalam masyarakat modern. Dalam sebuah masyarakat modern, konsep kesetaraan yang radikal dibutuhkan. Kesetaraan di mata hukum atau dalam pelaksanaan hak-hak sipil tidaklah cukup. Kesetaraan berarti kebebasan dari prasangka dan diskriminasi.

Gambar 10. Muatan Ideologi/Hidden Curriculum
Sumber: (Maryati & Suryawati, 2014:91) |buku kelas 11

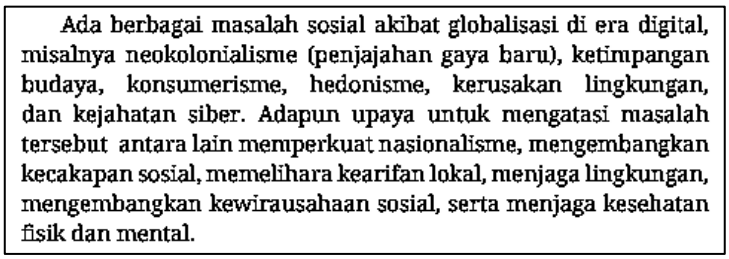
Narasi ini berusaha menyisipkan pemahaman bahwa konsep kesetaraan dalam masyarakat modern harus mencakup perubahan budaya dan struktural, bukan hanya aspek hukum formal, pemahaman ini adalah bagian dari muatan ideologi egalitarianisme kearah radikal. Egalitarianisme radikal adalah sebuah konsep yang mengacu pada gagasan kesetaraan yang mendalam dan menyeluruh di semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Markos, 2013).

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

2. Kritik Orde Baru
3. 
Selama masa pemerintahan Orde Baru, orang Indonesia terbiasa menggunakan kekerasan dalam upaya memperoleh sesuatu. Yang menang dalam konflik dengan kekerasan adalah yang dominan dan yang berkuasa. Dialah yang menguasai sumber-sumber daya yang ada. Model kekerasan itulah yang diacu dalam konflik-konflik yang terjadi saat ini.

Gambar 11. Muatan Ideologi/Hidden Curriculum
Sumber: (Maryati & Suryawati, 2014:97) |buku kelas 11

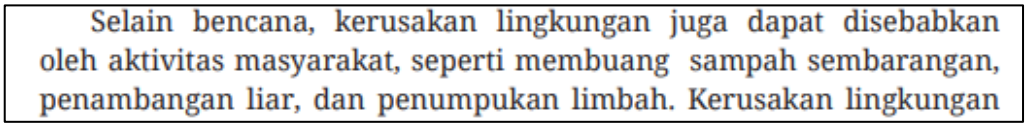
d. Kurikulum Merdeka

1. Muatan nilai lokal menjadi solusi globalisasi
2. 
Ada berbagai masalah sosial akibat globalisasi di era digital, misalnya neokolonialisme (penjajahan gaya baru), ketimpangan budaya, konsumerisme, hedonisme, kerusakan lingkungan, dan kejahatan siber. Adapun upaya untuk mengatasi masalah tersebut antara lain memperkuat nasionalisme, mengembangkan kecakapan sosial, memelihara kearifan lokal, menjaga lingkungan, mengembangkan kewirausahaan sosial, serta menjaga kesehatan fisik dan mental.

Gambar 12. Muatan Ideologi/Hidden Curriculum
Sumber: (Purwasih & Pratiwi, 2022:142)

Muatan nilai-nilai nasionalisme dan kearifan lokal dijadikan solusi dalam menghadapi globalisasi. Kurikulum merdeka, memang banyak menggunakan pendekatan kearifan lokal, nasionalisme dan pancasila dalam melihat masalah sosial. Kalimat ini menyarankan bahwa kearifan lokal dan nasionalisme dapat menjadi solusi terhadap dampak globalisasi, namun hal ini dapat dianggap sebagai simplifikasi terhadap masalah yang lebih kompleks. Pendekatan ini cenderung mengabaikan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang berakar dalam struktur masyarakat, yang tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan nilai-nilai lokal atau nasional.

3. Narasi timpang terhadap Masyarakat


Selain bencana, kerusakan lingkungan juga dapat disebabkan oleh aktivitas masyarakat, seperti membuang sampah sembarangan, penambangan liar, dan penumpukan limbah. Kerusakan lingkungan

Gambar 13. Muatan Ideologi/Hidden Curriculum
Sumber: (Purwasih & Pratiwi, 2022:9)

Narasi yang menyalahkan masyarakat sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan mengabaikan peran penting perusahaan besar dan struktur ekonomi-politik yang lebih luas dan dampak penambangan legal. Ketimpangan ini menciptakan kesalahan besar dalam pemahaman masalah lingkungan, di mana masyarakat yang lebih rentan justru dijadikan 'tersangka' utama, sementara perusahaan-perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi dan politik yang dominan, yang memiliki kapasitas untuk merusak lingkungan secara sistematis, tidak disentuh. Narasi ini memarginalkan analisis terhadap dinamika struktural yang menguntungkan korporasi, serta ketidakmampuan negara dalam mengatur dampak ekologis, mengabaikan akar penyebab yang lebih dalam dalam kerusakan lingkungan tersebut.

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

Reproduksi Ideologi dan Hidden Curriculum dalam Buku Teks Sosiologi sebagai Bagian dari ISA

Louis Althusser berpendapat bahwa sistem pendidikan adalah salah satu *Ideological State Apparatus* (ISA) yang memiliki peran penting dalam mereproduksi ideologi yang mendukung kelas penguasa dan mempertahankan status quo sosial. Althusser mengungkapkan bahwa ISA (seperti sekolah, media, dan institusi agama) menyebarkan ideologi dominan melalui praktik-praktik yang tidak terlihat, membentuk cara individu berpikir, bertindak, dan memahami posisi mereka dalam masyarakat. (Althusser, 2007:167) membagi aparat negara menjadi dua yaitu; 1) Aparatus Represif Negara yang terdiri dari Pemerintahan, Tentara, Polisi, dan lainnya yang menjalankan fungsinya dengan kekerasan 2) Aparatus Ideologi Negara/ *Ideological State Apparatus* (ISA) yang menjalankan 'fungsinya' dengan ideologi. ISA bermacam-macam, umumnya adalah lembaga keagamaan, pendidikan, media dan lainnya. Aparatus Negaralah yang menentukan Negara sebagai sebuah kekuatan pelaksana dan intervensi demi kepentingan-kepentingan kelas yang berkuasa. Dalam konteks penelitian ini, buku pelajaran sosiologi berfungsi sebagai ISA yang penting, menyisipkan nilai-nilai, ideologi, dan hubungan kekuasaan yang mendominasi dalam pikiran para siswa (Althusser, 2007).

Berdasarkan analisis konten ini, Kurikulum 2004 hingga Kurikulum Merdeka mencerminkan perubahan ideologi yang sesuai dengan konsteks peristiwa dan agenda nasional (seperti nasionalisme, multikulturalisme, dan globalisasi) sekaligus membentuk persepsi siswa tentang lingkungan sosial mereka.

- **Kurikulum 2004**
  Penekanan pada globalisasi sebagai ancaman dan kapitalisme sebagai pengaruh asing sesuai dengan ideologi yang ingin memperkuat nilai-nilai nasional. Kurikulum ini menyampaikan ketidakpercayaan terhadap pengaruh luar dan menekankan pentingnya kestabilan sosial di dalam negeri. Dalam pandangan Althusser, ini adalah upaya negara untuk melindungi struktur ideologis dengan membentuk warga negara yang melihat identitas nasional sebagai hal yang perlu dipertahankan. Hal ini menunjukkan upaya negara untuk membentuk identitas nasional yang statis, mengabaikan kemungkinan adanya ketidakadilan yang ditimbulkan oleh sistem global yang lebih luas.
- **Kurikulum 2006**
  Kurikulum ini lebih banyak menyoroti multikulturalisme dan globalisasi, namun tetap ada kritik terhadap dampak negatifnya. Hal ini menggambarkan adanya ideologi yang kontradiktif, di mana sistem mendukung penerimaan terhadap globalisasi namun tetap memberi ruang untuk kritik sosial. Kontradiksi ini menciptakan ketidakjelasan, karena meskipun ada ruang untuk mengkritik, kritik tersebut tidak diarahkan untuk mempertanyakan struktur sosial yang ada, melainkan hanya untuk membatasi dampak negatif yang disebabkan oleh globalisasi. Althusser menyebut ini sebagai ideologi yang saling bertentangan, di mana negara mencoba mempertahankan stabilitas dengan memberi sedikit ruang untuk kritik terhadap aspek-aspek tertentu dari sistem yang dominan.
- **Kurikulum 2013**
  Penekanan pada multikulturalisme dan kearifan lokal bersama dengan globalisasi menunjukkan upaya negara untuk menyeimbangkan pengaruh global dengan nilai-nilai nasional, bukan untuk membuka ruang bagi kritik terhadap ketimpangan sosial yang dihasilkan oleh sistem kapitalis global. Ini mencerminkan konsep *interpellation* Althusser, di mana siswa diajak untuk mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai seperti nasionalisme dan harmoni sosial, tetapi juga dihadapkan pada pengaruh global. Akibatnya, siswa diinternalisasi dengan ideologi yang sejalan dengan kepentingan negara, dengan tetap memberikan ruang untuk pengaruh eksternal.

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

- **Kurikulum Merdeka**
  Di sini, globalisasi dilegitimasi dan dipandang sebagai peluang, sementara fokus pada kearifan lokal lebih ditekankan sebagai solusi, berfungsi untuk melanggengkan ideologi dominan yang mengedepankan nilai-nilai stabilitas dan keberlanjutan sosial. Meskipun kurikulum ini menyarankan pentingnya nilai-nilai lokal, hal ini lebih merupakan strategi negara untuk menciptakan narasi yang mendukung kestabilan sosial dan menutupi ketidaksetaraan yang mungkin timbul dari globalisasi. Ini adalah bentuk reproduksi ideologi yang lebih halus, di mana negara berusaha untuk menyelaraskan nilai-nilai global dan lokal dalam kurikulum. Menurut Althusser, ini merupakan ideologi yang lebih terintegrasi, yang meminimalisasi kritik terhadap globalisasi dan memperkuat nilai-nilai nasional dan lokal yang dapat menjaga kestabilan sosial.

Dari ke-empat kurikulum tersebut, terlihat bagaimana globalisasi mengalami pergeseran untuk dimaknai dan disikapi. Pada kurikulum 2004, globalisasi benar-benar dikritik tajam namun pada akhirnya tetap diterima seiring perubahan zaman. Pergeseran ini lebih mencerminkan upaya negara untuk menyesuaikan ideologi dominan dengan perubahan global daripada mendidik siswa untuk memahami dampak 'asimetris' globalisasi pada masyarakat kelas bawah. Pada kurikulum merdeka terlihat secara jelas bagimana nilai-nilai lokal dijadikan solusi dan ditekankan sebagai karakter yang perlu dan wajib dimiliki oleh siswa dalam menghadapi globalisasi dengan berbagai dampaknya. Namun, penekanan nilai lokal dalam kurikulum merdeka juga tidak sepenuhnya hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman, tetapi lebih merupakan strategi negara untuk menciptakan narasi stabilitas yang melayani kepentingan ideologi dominan, alih-alih memberdayakan siswa untuk mengkritisi hubungan kekuasaan di balik narasi tersebut.

Hidden Curriculum dan Ideologi dalam Buku Pelajaran Sosiologi

Hidden curriculum mengacu pada pesan-pesan dan nilai-nilai yang secara implisit disampaikan melalui pendidikan, yang tidak ada dalam kurikulum formal namun sangat berpengaruh dalam membentuk pola pikir siswa. Meminjam Teori *Ideological State Aparatus (ISA)* Althusser dapat dijelaskan bagaimana *hidden curriculum* berfungsi dalam pendidikan yaitu sebagai berikut;

a. *Reproduksi Status Quo*: Melalui pengalihan tanggung jawab sosial kepada individu (misalnya dengan menyatakan bahwa ketimpangan sosial disebabkan oleh perilaku individu, bukan faktor struktural), kurikulum memperkuat ideologi individualisme, yang melayani kepentingan sistem yang ada. Hal ini tidak hanya menghindari kritik terhadap sistem kapitalis tetapi juga membatasi siswa untuk melihat kemungkinan perubahan struktural sebagai solusi atas masalah sosial. Dalam pandangan Althusser, ini adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai kapitalis dan status quo dengan cara mencegah pemahaman kritis tentang masalah sosial, sambil menanamkan gagasan bahwa individu seharusnya menyesuaikan diri dengan norma sosial tanpa mempertanyakan ketidakadilan struktural.
b. *Reproduksi Ideologi dalam Hidden Curriculum*: Meskipun kurikulum secara eksplisit mempromosikan nilai seperti nasionalisme atau multikulturalisme, ada juga pesan tersembunyi yang mengarah pada subordinasi kelompok-kelompok tertentu (misalnya, kelas bawah, kelompok marginal) melalui bahasa, representasi, dan fokus selektif. Pesan-pesan tersembunyi ini, sering kali mereproduksi stereotip negatif tentang kelompok marginal melalui pilihan bahasa dan representasi yang bias. Ini memperkuat subordinasi mereka dalam hierarki sosial, menjadikan siswa terbiasa dengan ketidakadilan sebagai sesuatu yang wajar, alih-alih menumbuhkan solidaritas atau kesadaran kritis. Penekanan eksplisit pada nilai-nilai tertentu seperti nasionalisme tanpa memberikan ruang yang cukup untuk wacana kritis tentang kekuasaan dan ketimpangan menunjukkan bahwa kurikulum tidak hanya mendidik tetapi juga memanipulasi. Dengan cara ini, hidden curriculum bekerja untuk menciptakan warga negara yang tunduk, bukan individu yang

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

berpikir kritis. Pesan-pesan ideologi tersembunyi ini memastikan kelanjutan hubungan kekuasaan berbasis kelas, di mana siswa disosialisasikan untuk menerima ketimpangan sosial sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan.

Dengan mencermati perubahan-perubahan ini, kita dapat melihat bagaimana *hidden curriculum* berperan dalam memperkuat ideologi yang mendukung status quo, dengan menggambarkan ketimpangan sosial dan peran pemerintah secara lebih menguntungkan. Buku teks sosiologi sering kali mengalihkan fokus pada masalah individu atau kelompok, sementara mengabaikan analisis yang lebih kritis terhadap sistem sosial dan ekonomi yang ada.

Transfer Ideologi dari Generasi Muda hingga Anak Usia Dini Melalui *Learning Continuum*

Transfer ideologi dari generasi muda hingga anak usia dini melalui *learning continuum* dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme reproduksi ideologi, sebagaimana dijelaskan oleh Louis Althusser, bahwa ideologi bekerja melalui Aparatus Ideologis Negara (*Ideological State Apparatus/ISA*) untuk memastikan tatanan sosial yang ada terus berlangsung dan dilanggengkan, terdapat berbagai macam Apparatus Ideologi Negara (ISA/AIN) seperti lembaga keagamaan, komunitas, kebudayaan, pendidikan dan lainnya. Althusser, (2007:147-222) menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat strategis untuk memuat ideologi-ideologi dari kelas yang berkuasa. Muatan ideologi dikemas dengan pengetahuan sedemikian rupa yang ditampilkan secara eksplisit maupun implisit yang dapat disebut sebagai *hidden curriculum*. ISA pendidikan berfungsi membentuk individu menjadi subjek ideologis, yakni orang-orang yang menerima dan menjalankan nilai-nilai dominan secara tidak sadar. Dalam konteks ini, generasi muda memainkan peran penting sebagai penghubung ideologi dari ISA pendidikan kepada anak usia dini.

(Althusser, 2007:182) menyatakan bahwa;

> *"Aparatus itu menjadikan anak-anak dari setiap kelas sosial yang memasuki usia sekolah dan selama bertahun-tahun itu pula anak-anak berada dalam keadaan rentan, merasa terjepit di anatara aparatus negara berupa pendidikan dan keluarga. ISA pendidikan menanamkan entah dengan apa, sejumlah pengetahuan praktis yang menjadi pembungkus atas ideologi yang berkuasa."*

Pernyataan tersebut menunjukkan, anak-anak menjadi sarana empuk untuk dijadikan agen ideologi yang berkamuflase menjadi subjek itu sendiri. Siswa Sekolah Menengah yang mempelajari buku Sosiologi, akan bertindak sebagai "agen ideologi" yang telah dibentuk oleh ISA pendidikan. Nilai-nilai yang telah mereka internalisasi, seperti nasionalisme, moralitas agama, toleransi atau norma sosial tertentu atau pemahaman diskriminatif, radikal dan lainnya dalam buku sosiologi tersebut, secara sadar maupun tidak, ditransmisikan kepada anak usia dini (subjek ideologi). Proses ini berlangsung secara berkesinambungan melalui *learning continuum*, di mana aktivitas sehari-hari seperti bermain, bercerita, atau ritual sosial menjadi media transfer nilai-nilai ideologis. Misalnya, dalam keluarga, generasi muda yang sudah memiliki pemahaman tentang peran gender tertentu dari buku sosiologi tersebut, akan menyampaikan hal yang sama kepada anak usia dini melalui pembagian peran saat bermain atau interaksi sosial lainnya. Begitu pula di ruang publik, cerita rakyat yang diceritakan ulang oleh generasi muda sering kali membawa nilai-nilai nasionalisme yang diteruskan kepada anak-anak.

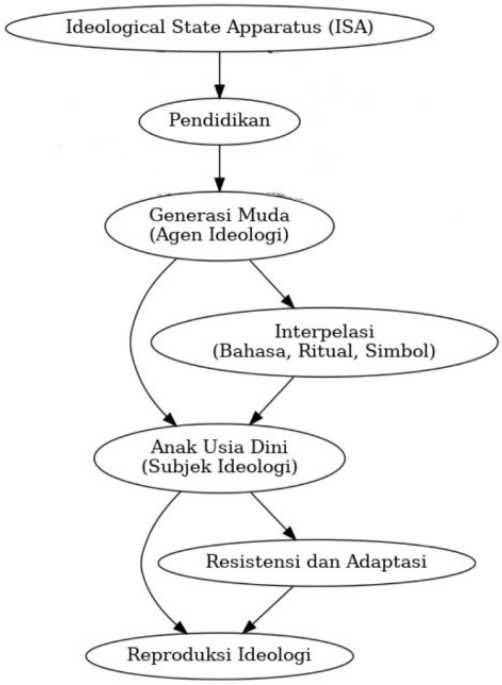
Learning Continuum merupakan salah satu pendekatan yang mana pembelajaran dipandang sebagai sesuatu yang tidak berhenti, melainkan terus berkembang sepanjang waktu, baik di dalam maupun di luar konteks formal pendidikan yang berkelanjutan bagi anak sejak usia dini hingga remaja (*Capturing Ordinary Days: The Learning Continuum*, 2024). Menyiratkan bahwa ilmu yang didapat lantas tidak berhenti saat siswa lulus sekolah. Seperti halnya bagi siswa SMA yang mempelajari sosiologi melalui buku ini, tidak serta-merta ilmu

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

dan pemahaman sebagai hasil pembelajaran mereka berhenti dan menguap begitu saja tanpa 'hikmah', namun pembelajaran yang mereka peroleh dalam bentuk pengetahuan, nilai dan keyakinan akan terus menerus mereka langgengkan.

Generasi muda yang telah menjalani proses mempelajari buku sosiologi ini, membawa nilai-nilai yang telah diinternalisasi kepada anak usia dini sebagai kelompok paling rentan dan sedang berada pada tahap pembentukan nilai, yang dilakukan baik melalui kegiatan informal seperti bercerita maupun praktik pengajaran sederhana dengan mereproduksi nilai-nilai dominan dari buku sosiologi tersebut, kemudian mentransfernya kepada anak usia dini melalui aktivitas sehari-hari. Proses ini mencakup penggunaan bahasa, cerita, simbol budaya, dan praktik sosial yang secara halus menginterpelasi anak menjadi subjek ideologis. Misalnya, cerita rakyat yang menggambarkan nasionalisme atau kegiatan keagamaan yang menanamkan nilai moral menjadi sarana reproduksi ideologi dalam hubungan antargenerasi. Proses transfer ideologi ini tidak netral. Generasi muda yang telah menjadi subjek ideologi dominan bertindak sebagai agen dalam relasi kuasa, mereproduksi hegemoni ideologi kepada anak usia dini. Althusser menekankan bahwa reproduksi ideologi ini menciptakan keterkondisian di mana individu menginternalisasi nilai-nilai tersebut tanpa menyadari bahwa mereka adalah bagian dari struktur yang melanggengkan sistem dominan. Reproduksi idelolgi yang tertanam dalam *hidden curriculum* pelajaran SMA tidak berhenti di ruang kelas, akan tetapi akan meresap ke dalam masyarakat. Anak usia dini, sebagai generasi penerus, menerima ideologi ini melalui nilai-nilai di atas. Anak-anak dalam pandangan Althusser memang digambarkan dengan kondisi 'terhimpit' karena anak usia dini umumnya belajar melalui proses imitasi dan observasi terhadap orang yang lebih tua, terlebih mereka sedang berada pada tahap pembentukan nilai dan karakter pada akhirnya secara tidak sadar meneruskan nilai-nilau ideologi yang mereka anggap wajar.

Konsep *learning continuum* menunjukkan bahwa pendidikan bersifat lintas jenjang dan saling terhubung. Sehingga, anak usia dini menerima dampak ideologi dominan yang telah dilegitimasi di masyarakat yang sebagian besar dari sistem pendidikan formal, seperti SMA. Dengan demikian, *learning continuum* mencerminkan mekanisme reproduksi ideologi yang tidak hanya melanggengkan nilai-nilai dari kelas dominan, tetapi juga memungkinkan adanya resistensi atau justru adaptasi sesuai konteks zaman.



Gambar 14. Mekanisme Transfer Ideologi dari Generasi Muda ke Anak Usia Dini
Sumber: interpretasi penulis

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

Simpulan

Buku pelajaran sosiologi dalam sistem pendidikan Indonesia berfungsi sebagai alat untuk mereproduksi ideologi yang mendukung status quo sosial, ekonomi, dan politik. Melalui berbagai kurikulum yang berkembang, dari Kurikulum 2004 hingga Kurikulum Merdeka, buku teks ini membentuk pandangan siswa terhadap isu-isu seperti globalisasi, kapitalisme, ketimpangan sosial, dan penanaman nilai multikultural dengan mengurangi ruang untuk kritik struktural. Ideologi yang ditanamkan cenderung mengarah pada pemahaman ketidaksetaraan sosial sebagai masalah individual, bukan sebagai akibat dari ketidakadilan struktural, walaupun disisi lain terdapat ruang kritik terhadap pemerintah. Hal ini memperkuat peran Aparatus Ideologis Negara (ISA) pendidikan, yang bertugas membentuk cara pandang siswa agar menerima ketidaksetaraan dan hierarki sosial yang ada, melalui *hidden curriculum* yang ada dalam buku pelajaran sosiologi.

Proses transfer ideologi ini berlangsung melalui *learning continuum*, di mana generasi muda (siswa SMA) yang sudah terinternalisasi dengan ideologi dominan akan mentransmisikan nilai-nilai tersebut kepada anak-anak usia dini. Sebagai agen ideologi, generasi muda menyampaikan nilai-nilai yang telah dipelajari melalui kegiatan sehari-hari seperti bermain, bercerita, atau ritual sosial kepada anak usia dini sebagai subjek ideologi. Dengan demikian, buku teks sosiologi tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai ideologis yang membentuk pola pikir dan perilaku anak-anak, menjadikan mereka subjek ideologis yang menerima struktur sosial yang ada tanpa kesadaran penuh. Proses ini menunjukkan bagaimana ISA pendidikan memainkan peran penting dalam mempertahankan status quo melalui mekanisme pendidikan yang melibatkan transfer ideologi dari generasi muda kepada anak-anak.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Allah SWT, orang tua penulis yang telah mensupport dengan sangat luar biasa, Bpk. Moh Mudzakkir, S.Sos., M.A., Ph.D yang telah memberi ide dan gagasan penelitian, sahabat penulis, serta seluruh pihak yang terlibat sehingga saya bisa menyelesaikan artikel ini dengan baik, khususnya kepada diri saya sendiri yang tetap berjuang, memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih kepada Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari jurnal ini.

Daftar Pustaka

Alhamduddin. (2016). Sejarah Kurikulum di Indonesia. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, *1*, 43.

Althusser, L. (2007). *Lenin and Philosophy, and Other Essays* (Darmawan (Ed.); I). Resist Book.

Azizah, F. N. (2014). *Analisis Struktural-Semiotik Roman La Vie Devant Soi Karya Romain Gary* [Universitas Negeri Yogyakarta]. https://eprints.uny.ac.id/13600

Azmi, S. (2023). *Kajian Kurikulum dan Perkembangan Kurikulum di Indonesia* (N. Fahriza (Ed.); I). PT. Literasi Nusantara Abdi Grup.

Capturing Ordinary Days: The Learning Continuum. (2024). Montessoriguide.Org. https://montessoriguide.org/the-learning-continuum

Depdiknas. (2002). Kurikulum Berbasis Kompetensi: Ketentuan Pokok, Pengembangan Silabus, Penilaian Berbasis Kelas, Pengelolaan dan pelaksanaan KBK. *Jakarta Pusat*, *3804248*(4), 1–30. Berbasis Kompetensi Juni 2002.pdfhttps://repositori.kemdikbud.go.id/9209/1/Kurikulum

Ebadi, S. H. (2013). Hidden Curriculum: An Apparent Challenge or an Unexplored Opportunity? *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, *2*(2), 52–67. https://doi.org/10.6007/ijarped/v2-i2/9784

Edi, S. (2018). Ideologi, Kekuasaan, Dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965). *Journal of Indonesian History*, *7*(1), 19–34.

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

https://journal.unnes.ac.id/sju/jih/article/view/25371

Elisanti, & Rostini, T. (2009). *Sosiolgi untuk SMA/MA Kelas XI (KTSP)* (T. Prabowo (Ed.); I). Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasonal.

Hakim, L. (2024). *Human Development Index Dan Indeks Literasi*. Ushuluddin.Ptiq.Ac.Id. https://ushuluddin.ptiq.ac.id/2024/11/25/human-development-index-dan-indeks-literasi/

Harosid, H. (2019). Kurikulum 2013 Revisi 2017. *Scribd. Com*, 5. https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/GAMBARAN-UMUM-K13-REVISI-2017.pdf

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan. In *Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan*. Wamendik.pdfhttps://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/Paparan/Paparan

Khanifah, A., & Pribadi, F. (2022). Peran Aplikasi Ruang Guru Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Saat Pandemi Covid-19. *Joyful Learning Journal*, *11*(3), 92–99. https://doi.org/10.15294/JLJ.V11I3.52201

Laning, V. D. (2009a). *Sosiologi untuk Kelas XI SMA/MA (KTSP)* (M. M. Wari (Ed.)).

Laning, V. D. (2009b). *Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X (KTSP)* (M. M. Wari (Ed.)). Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasonal.

Mamduh, N., & Hidayat, R. (2019). Reproduksi Ideologi pada Buku Teks Sosiologi SMA Kurikulum 2006 dan 2013. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, *1*(2), 117–131. https://doi.org/10.52483/ijsed.v1i2.11

Markos, L. (2013). *The Dangers of Egalitarianism in a Democracy*. Theimaginativeconservative.Org. https://theimaginativeconservative.org/2013/03/the-dangers-of-egalitarianism-democracy.html

Maryani, I., & Dewi, F. (2018). Pelaksanaan Hidden Curriculum Pada Mata Pelajaran Pendidikan Al-Islam di Sekolah Dasar. *Eduhumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar*, *10*(1), 8–15. https://media.neliti.com/media/publications/240831-pelaksanaan-hidden-curriculum-pada-mata-1161b1a6.pdf

Maryati, K., & Suryawati, J. (2013). *Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X (Kurikulum 2013)* (R. P. Sitepu & R. Sitompul (Eds.); I). Esis dan Erlangga.

Maryati, K., & Suryawati, J. (2014). *Sosiologi untuk SMA/MA Kelas XI (Kurikulum 2013)* (R. P. Sitepu & R. Sitompul (Eds.); I). Esis dan Erlangga.

Maryati, K., & Suryawati, J. (2015). *Sosiologi untuk SMA/MA Kelas XII (Kurikulum 2013)* (R. P. Sitepu & R. Sitompul (Eds.); I). Esis dan Erlangga.

Maryati, K., Suryawati, J., & Suminar, N. R. (2022). *Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X (Kurikulum Merdeka)* (M. Yulianti & R. Sitepu (Eds.); I). Erlangga.

Muis, A. (2018). Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum Antara KBK , KTSP , dan K-13. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, *12*(1), 42–59. https://media.neliti.com/media/publications/458292-none-12a72879.pdf

Prasya, I. (2024). *Apa itu Kurikulum 2013 Revisi? Perubahan dan Implementasinya*. Studiliv.Com. https://studiliv.com/kurikulum-2013-revisi/

Pritchett, L., & Beatty, A. (2012). The Negative Consequences of Overambitious Curricula in Developing Countries. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2235869

Purwasih, J. H. G., & Pratiwi, S. S. (2021). *Sosiologi untuk SMA/MA Kelas XI (Kurikulum Merdeka)* (Supriyatno, E. O. M. Anwas, K. N. Iftitah, & Meylina (Eds.); I). Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Purwasih, J. H. G., & Pratiwi, S. S. (2022). *Sosiologi untuk SMA/MA Kelas XII (Kurikulum Merdeka)* (I. R. Ernawati (Ed.); I). Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasonal.

Rasidi. (2019). *Manajemen Kurikulum: Telaah Komparatif Antara Kurikulum Program Reguler dan*

DOI: 10.31004/obsesi.v8i6.6654

Akselerasi (M. Z. Rosyid (Ed.); I). Literasi Nusantara.

Sekretariat Kabinet RI. (2014). *Presiden Bentuk Komite Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Setkab.Go.Id. https://setkab.go.id/presiden-bentuk-komite-persiapan-pelaksanaan-masyarakat-ekonomi-asean/

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (Ed.); I). Penerbit Alfabet.

Suryana, S. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Edukasi*, *14*(1). https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971

Suwarno. (2012). Peran Guru dalam Keberhasilan Implementasi Kurikulum 2004. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, *2*(1), 65–73. https://doi.org/10.21831/jep.v2i1.656

Syafii, A. (2018). Ideologi Pendidikan Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu KKNI dan SNPT Berparadigma Integrasi-Interkoneksi. *Pendidikan Agama Islam*, *15*, 146. https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/jpai/article/view/2018.152-04

Uce, L. (2016). Analisis terhadap KBK, KTSP dan Kurikulum 2013. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, *16*(2), 216–229.

Wahyudin, D., Subkhan, E., Malik, A., Hakim, M. A., Sudiapermana, E., LeliAlhapip, M., Nur Rofika Ayu Shinta Amalia, L. S., Ali, N. B. V., & Krisna, F. N. (2024). Kajian Akademik Kurikulum Merdeka. In *Kemendikbud*. https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/1711503412_manage_file.pdf

Waridah, S., Sukardi, J., & Sunarto, P. (2003). *Sosiologi untuk SMA Kelas X (Kurikulum 2004)* (1st ed.). Bumi Aksara.

Waridah, S., Sunarto, & Isdiyano. (2005). *Sosiologi untuk SMA Kelas XII (Kurikulum 2004)*. Bumi Aksara.